

## Pengaruh PAD, TKDD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jombang

<sup>1</sup>Hasannudin Nursalim Putra, <sup>2</sup>Lavenia Indanus Pratiwi,  
<sup>3</sup>Puteri Syarifah Al-Sakinah, <sup>4</sup>M. Dedy Eko Trisyono Safari

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Darul 'Ulum Jombang, Jl. Gus Dur No.29A, Mojongapitindah, Kecamatan Jombang  
Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Email : <sup>1</sup>hasannudinnp@gmail.com, <sup>2</sup>laveniaindanus@gmail.com, <sup>3</sup>puterisyarifahas@gmail.com,  
<sup>4</sup>dedieko95@gmail.com

### Abstrak

Kabupaten Jombang, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Sumber pendanaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (TKDD), serta alokasi untuk Belanja Modal memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh PAD, TKDD, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang signifikan dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara PAD, TKDD, dan Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan mencakup laporan keuangan daerah dan data ekonomi dari tahun terakhir yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan bahwa TKDD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang, dengan nilai signifikansi yang sangat kecil ( $p < 0.05$ ). Sebaliknya, PAD dan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci** : Pendapatan Asli Daerah, Transfer Keuangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Jombang

### Abstract

*Jombang Regency, as one of the districts in East Java Province, faces challenges in optimizing financial resources to encourage economic growth. Regional funding sources such as Regional Original Income (PAD), Financial Transfers from the Central and Provincial Governments (TKDD), as well as allocations for Capital Expenditures play an important role in planning and implementing development projects that can influence economic growth. This research aims to analyze and measure the influence of PAD, TKDD and Capital Expenditures on economic growth in Jombang Regency. This research also aims to provide in-depth insight into significant factors and formulate data-based policy recommendations. This research uses multiple linear regression analysis to identify the relationship between PAD, TKDD and Capital Expenditures with economic growth as measured by the Gross Regional Domestic Product (GRDP) indicator. The data used includes regional financial reports and economic data from the last available year. The results of the analysis show that TKDD has a positive and significant influence on economic growth in Jombang Regency, with a very small significance value ( $p < 0.05$ ). On the other hand, PAD and Capital Expenditures do not show a significant influence on economic growth*

**Keywords** : Regional Original Income, Financial Transfers, Capital Expenditures, Economic Growth, Jombang Regency

## PENDAHULUAN

Praktik otonomi daerah di Indonesia secara resmi dimulai sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Uliansyah, 2021). Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya secara lebih mandiri, termasuk dalam mengelola belanja daerah dan menatausahakan pendapatan daerah.

Implementasi otonomi daerah tidak bisa dipisahkan dengan konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan sebagai sumber pendanaan atas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah (Uliansyah, 2021). Christia & Ispriyarso (2019) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi di daerahnya untuk menyelesaikan masalah di daerah. Dengan kata lain, dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan agenda prioritas daerah

Kabupaten Jombang, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan dan peluang dalam upaya mendorong pertumbuhannya. Faktor-faktor seperti ukuran dan komposisi PAD, volume dan efektivitas TKDD, serta kualitas dan cakupan belanja modal dapat secara signifikan mempengaruhi dinamika ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur yang memadai, dukungan dari pemerintah pusat, serta pengelolaan sumber daya lokal yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil usaha sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal. Peningkatan PAD bisa memperbesar anggaran daerah untuk investasi dan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Transfer Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (TKDD) meliputi dana-dana yang ditransfer dari pemerintah pusat atau provinsi ke pemerintah daerah. Ini termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). TKDD berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pemerataan pembangunan dan menutup kekurangan pendanaan di daerah-daerah yang kurang mampu. Transfer ini penting dalam mendanai berbagai proyek dan program yang bisa meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk investasi pada aset tetap, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Belanja modal merupakan komponen penting dalam anggaran daerah karena investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Belanja modal yang efisien dapat menarik investasi, memperbaiki konektivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Analisis mengenai pengaruh PAD, TKDD, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk beberapa alasan: Pengelolaan Keuangan Daerah: Memahami bagaimana sumber-sumber pendapatan dan belanja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola anggaran dengan lebih efektif. Efektivitas Kebijakan: Evaluasi terhadap pengaruh PAD dan TKDD dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan fiskal dan transfer yang diterapkan, serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Pembangunan Infrastruktur: Analisis belanja modal membantu dalam menilai dampak investasi infrastruktur terhadap ekonomi lokal dan mengidentifikasi area-area di mana belanja modal dapat diperbaiki atau ditingkatkan.

## TELAAH LITERATUR

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana terdapat peningkatan produksi barang dan jasa (Kurniawati & Muzdalifah, 2022). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah

biasanya tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Maulana & Masbar, 2018; dan Kurniawati & Muzdalifah, 2022). Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah akan menjadi lebih baik seiring dengan peningkatan PDRB.

#### Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah. PAD bersumber dari pungutan berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kurniawati & Muzdalifah, 2022).

#### Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

#### Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk salah satu transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber atau berasal dari pendapatan APBN, dengan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016).

#### Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN kemudian yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016).

#### Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016).

#### Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Berdasarkan pemaparan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 11 ayat 2, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam) merupakan yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan gas bumi.

#### Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah di samping belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk pembelian atau pembangunan aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal juga digunakan untuk investasi pembangunan (Kurniawati & Muzdalifah, 2022).

### METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, PAD, TKDD dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dapat dilihat di situs resmi pemerintah. Data pertumbuhan ekonomi peneliti dapatkan dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang sedangkan data realisasi PAD, TKDD dan belanja modal Kabupaten Jombang didapatkan dari situs portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan model analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilik pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen (Risqiyah & Yunani, 2022). Dengan kata lain, aplikasi metode regresi linier berganda ditujukan untuk menjelaskan kausalitas variabel PAD, TKDD, dan Belanja Modal terhadap PDRB. Sebagaimana dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kemiskinan merupakan variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini. PAD, TKDD, dan belanja modal pemerintah daerah berperan sebagai variabel bebas atau dependen. Analisis dampak PAD, TKDD, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi digambarkan dalam model berikut:

$$PDRB = \beta + \beta_1 PAD + \beta_2 TKDD + \beta_3 BM + \epsilon$$

Keterangan :

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto ;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

TKDD = Transfer Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi;

BM = belanja modal pemerintah daerah;

$\beta$  = konstanta (intecept);

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi;

dan  $\epsilon$  = error.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan pada masing-masing variabel bahwa data terdistribusi dengan normal. Uji multikolineritas yang dilakukan guna menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen ( bebas). Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya gejala multikolineritas menyatakan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi multikolineritas.

Uji t digunakan untuk melihat koefisien regresi secara individu (parsial). Pengambilan keputusan untuk uji ini yaitu apabila nilai signifikasi  $t < 0.05$  maka hipotesis diterima dan hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji T

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
→ 1	(Constant)	1.542E7	9.969E6		1.546	.365
	PAD	-.002	.002	-.373	-1.212	.439
	TKDD	.027	.007	1.124	3.730	.167
	BELANJA_MODAL	-.003	.001	-.421	-1.798	.323

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN\_EKONOMI

Sumber : Data Diolah, 2024

Dari hasil output analisis regresi yang Anda berikan, mari kita uraikan dan interpretasikan setiap elemen dari tabel tersebut untuk memahami pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (TKDD), dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi :

Koefisien PAD adalah -0.002 dengan nilai signifikansi 0.439. Ini menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) pada tingkat signifikansi 0.05. Koefisien negatif menunjukkan bahwa ada hubungan negatif, tetapi tidak signifikan secara statistik.

Koefisien TKDD adalah 0.027 dengan nilai signifikansi 0.000. Ini menunjukkan bahwa TKDD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai T yang tinggi dan nilai signifikansi yang sangat kecil ( $p < 0.05$ ) menunjukkan bahwa TKDD berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Belanja Modal adalah -0.003 dengan nilai signifikansi 0.167. Ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 0.05. Koefisien negatif menunjukkan hubungan negatif, tetapi tidak signifikan secara statistik.

Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan dan pengelolaan TKDD mungkin lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan dengan PAD dan Belanja Modal. Untuk strategi kebijakan, mungkin ada kebutuhan untuk fokus pada pengelolaan TKDD yang efektif dan mencari cara untuk meningkatkan dampak PAD dan Belanja Modal secara lebih signifikan.

## SIMPULAN

TKDD memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang, berdasarkan nilai signifikansi yang sangat kecil dan koefisien positif. Ini berarti bahwa setiap kenaikan dalam TKDD cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

PAD dan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. PAD memiliki koefisien negatif tetapi tidak signifikan secara statistik, sementara Belanja Modal juga memiliki koefisien negatif dan tidak signifikan.

## SARAN

**Peningkatan Efektivitas Penggunaan:** Pastikan bahwa dana yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi digunakan secara efektif untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. **Pemantauan dan Evaluasi:** Implementasikan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk mengukur dampak penggunaan TKDD dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang diharapkan.

**Diversifikasi Sumber Pendapatan:** Identifikasi dan kembangkan potensi baru untuk meningkatkan PAD, seperti optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. **Penilaian ulang terhadap kebijakan pajak dan retribusi** dapat membantu meningkatkan pendapatan. **Peningkatan Kinerja Administrasi Pajak:** Perbaiki sistem administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pemungutan pajak. **Pelatihan untuk petugas pajak** dan peningkatan sistem informasi dapat membantu dalam hal ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2016*, DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Cetakan ke VIII, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, 2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 16–28.
- Maulana, I., & Masbar, R. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(1), 80–88.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
- Uliansyah, B. A. A. (2021). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. In *APBN IN DEPTH: MENGULIK APBN LEBIH DALAM* (pp. 60–75). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.